

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
(Survei Pada Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Devi Indra Kartika**

**Nim : 222014065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
(Survei Pada Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Devi Indra Kartika**

**Nim : 222014065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Indra Kartika

NIM : 22 2014 065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan



Devi Indra Kartika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat  
Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Kec. Tebing  
Tinggi Kab. Empat Lawang)  
Nama : Devi Indra Kartika  
NIM : 222014235  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 04 Februari 2019

Pembimbing I,



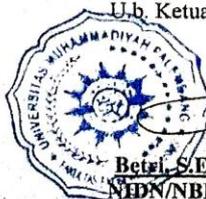
DR. Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0226016901/765380

Pembimbing II,



Mizan, S.E., Ak., M.Si  
NIDN/NBM : 0206047101/859196

Mengetahui,  
Dekan  
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betji, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto:*

*“Jadikanlah kegagalan sebagai motivasi karena kegagalan akan memberikan pelajaran tentang pahit & manisnya perjuangan untuk mencapai puncak keberhasilan & kesuksesan”*

*“Satu kali keberhasilan ku akan membayar setiap tetes keringat & letih orang tua ku”*

*(Devi Indra Kartika)*

*Dengan cinta dan do'a ku persembahkan Skripsi kepada:*

- *Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Zinal Ikhisan & Ibu Yanti Marlina) terimakasih untuk setiap do'a dan dukungan di setiap langkah ku terimakasih untuk setiap tetes keringat kalian demi keberhasilan ku.*
- *Ayuk, kakak, adik & keponakan ku (Liza Meita Rina, Roli Mere, Syafi'i Ma'Arif & Alya Nura Nazira) terimakasih untuk setiap do'a dan semangat untuk ku*
- *Seluruh keluarga besarku*
- *Almamaterku.*



## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang). Sebagaimana diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan yang ada penulis merumuskan bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, bagaimanakah pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan; bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis; bab metode penelitian; bab hasil penelitian dan pembahasan; serta bab simpulan dan saran. Pada penulisan skripsi ini, penulis sudah melakukan semaksimal mungkin mencurahkan kemampuan yang dimiliki, tetapi tanpa adanya saran, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua ku tercinta (Bapak Zainal Ikhsan dan Ibu Yanti Marlina) yang dengan senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil yang memiliki makna yang besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu DR.Hj.Yuhanis Ladewi,S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing 1 dan bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darma Yanti, S.E.,Ak.,M.M selaku Pembimbing Akademik paket 12 akuntansi.
5. Pemerintah Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama dan Desa Lampar Baru yang telah memberikan izin penelitian.

6. Seluruh Responden yang telah membantu dalam pengisian kuisisioner yang telah dibagikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan, amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin

*Wasaalamualaikum Wr.Wb*

**Palembang, 2019**  
**Penulis**

**Devi Indra Kartika**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| HALAMAN DEPAN/COVER .....              | i              |
| HALAMAN JUDUL.....                     | ii             |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... | iii            |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | iv             |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....     | v              |
| HALAMAN PRAKATA .....                  | vi             |
| HALAMAN DAFTAR ISI .....               | ix             |
| HALAMAN DAFTAR TABEL .....             | xii            |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....             | xiv            |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....          | xv             |
| ABSTRAK .....                          | xvi            |
| ABSTRACT.....                          | xvii           |
| <br>                                   |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....                | 11             |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| C. Tujuan Penelitian .....  | 11 |
| D. Manfaat Penelitian ..... | 11 |

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

|  |    |
|--|----|
| A. Landasan Teori .....                              | 13 |
| 1. Akuntabilitas.....                                | 13 |
| 2. Pengertian Akuntabilitas .....                    | 13 |
| 3. Pengukuran Akuntabilitas .....                    | 14 |
| 4. Partisipasi .....                                 | 17 |
| a. Pengertian Partisipasi .....                      | 17 |
| b. Pengukuran Partisipasi .....                      | 18 |
| 5. Dana Desa.....                                    | 19 |
| a. Pengertian Dana Desa.....                         | 19 |
| b. Besaran Dana Desa.....                            | 20 |
| c. Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....              | 20 |
| B. Kerangka Pemikiran dan Penelitian Sebelumnya..... | 23 |
| C. Hipotesis .....                                   | 29 |

## **BAB III METODE PENELITIAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....     | 30 |
| B. Lokasi Penelitian .....    | 31 |
| C. Operasional Variabel ..... | 31 |
| D. Populasi dan Sempel.....   | 33 |

|  |    |
|--|----|
| E. Data yang Diperlukan .....              | 34 |
| F. Metode Pengumpulan Data .....           | 35 |
| G. Metode Pengujian Data .....             | 36 |
| H. Analisis Data dan Teknik Analisis ..... | 39 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian.....            | 50 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 84 |

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 89 |
| B. Saran .....   | 89 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

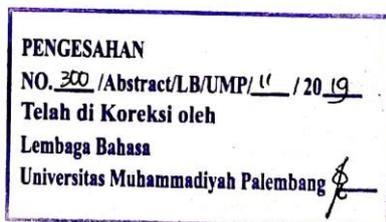


### Abstract

*Devi Indra Kartika / 222014065 / 2019 / The Effects of Accountability and Community Participation on Survey Village Fund Management in Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang / Public Sector Accounting.*

*This research aimed to address existing problems, namely how could influence accountability on the Village Fund Management in Kecamatan Tebing Tinggi, how could the influence of participation on the Village Fund Management in Kecamatan Tebing Tinggi. The purpose of this research was to know the influence of accountability on the Village Fund Management in Kecamatan Tebing Tinggi, to know the influence of participation on the Village Fund Management in Kecamatan Tebing Tinggi. The type of research in this research was descriptive research and associative. This research was conducted in Kecamatan Tebing Tinggi. The variables in the research was accountability, participation and management of the Fund. The data in this research was the primary data collection techniques with data using a detailed questionnaire. Analytical methods and techniques of data analysis used in this research was quantitative and qualitative methods of analysis technique and descriptive analysis with.*

*Keywords: accountability, participation, management of the village Fund.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan dan pembangunan Kabupaten atau Kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan atau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada



Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan Pahala Nainggolang Deputi Bidang Pencegahan korupsi pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan sedikitnya korupsi pemberantasan korupsi (KPK) menemukan 300 laporan soal buruknya pengelolaan dana desa, dalam rapat Bulan Maret lalu, Kemendes juga menyampaikan menerima sedikitnya 600 laporan soal buruknya pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jatim Fira, mengatakan bahwa kurangnya transparansi, minimnya keterlibatan masyarakat setempat dan tidak di pertanggungjawabkannya program yang telah dilaksanakan.

Fenomena lainnya juga yang dikemukakan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*), ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mengemukakan bahwa Sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan dalam

mengelola keuangan secara mandiri. Secara nasional menurut ICW (*Indonesian Corruption Watch*), hingga akhir 2017 lalu tercatat ada 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Angka ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Modus korupsi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aparaturnya dalam melakukan penyelewengan dana desa, sehingga modusnya menjadi sangat beragam. Salah satunya adalah terbukanya peluang penyelewengan akibat pengawasan masyarakat yang lemah, sehingga berbagai metode penyelewengan terjadi.

Hal yang sama fenomena yang dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat sekelas bupati. Kali ini, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii dituduh oleh KPK atas dugaan penggelapan dana desa. Selain bupati, KPK juga menangkap pejabat di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pada hakikatnya, kasus korupsi dana desa yang diungkap oleh KPK di Pamekasan bukanlah fenomena baru. Bisa jadi korupsi dana desa sudah berlangsung sejak program tersebut dialokasikan pada 2014. Hanya saja masyarakat yang mencium gelagat korupsi dana tersebut tidak mau tau, atau bahkan takut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Hal ini didasari atas beberapa hal, diantaranya Faktor eksternal. Artinya, masyarakat desa memang tidak peduli terhadap dana desa. Masyarakat perdesaan menganggap bahwa pembangunan desa sepenuhnya menjadi

urusan dan tanggung jawab kepala desa. Dalam konteks ini, dana desa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa tanpa inisiatif untuk mengontrol. Keuangan desa dikelola berdasarkan azaz-azaz transparan, akuntabel, partisipasif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Rangkaian dan azaz pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Yuliansyah, 2016: 47)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 19 menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah azaz yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009: 20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik antara lain, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kejujuran

(*accountabilty of porbity*) yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum (*Legal accounting*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dana penggunaan sumber dana publik, kedua akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, ketiga akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang di ambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2009: 22).

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa inggris *participation* yang berarti peran serta, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2014: 141).

Macam-macam program partisipasi antara lain:Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*) merupakan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama, partisipasi dalam pelaksanaan (*participation implementation*) merupakan penggerakan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program, partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefist*) merupakan partisipasi yang berkaitan dengan program yang

telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas, partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*) merupakan partisipasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh (Solekhan, 2014: 153).

Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Empat Lawang pihaknya telah melakukan tindakan hukum dan menetapkan tersangka berinisial S, jabatan sebagai Kades Batu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi. Kejari empat lawang mengungkapkan bahwa Pelaku sebagai PNS atau penyelenggara negara secara melawan hukum, memaksa menerima hadiah atau janji atau melakukan pemufakatan jahat dalam pelaksanaan DD di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Kejari juga mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa melakukan penahanan, untuk menghindari yang bersangkutan melarikan diri atau penghilangan barang bukti.

Sama halnya yang dikemukakan oleh Arman Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Talang Padang, Arman mengungkapkan bahwa ada beberapa proyek pengerjaan dengan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang disinyalir adanya tindakan pidana korupsi (tipikor) tersebut, diantaranya pembangunan tembok-tembok dana sebesar Rp. 119

juta, disinyalir hanya direalisasikan sebesar Rp. 40 juta, pembangunan jalan setapak sebesar Rp. 24 juta hanya terealisasi sebesar Rp. 18 juta dan pembangunan sarana air bersih sebesar Rp. 50 juta, serta dana pemberdayaan desa sebesar Rp.84 juta hanya digunakan untuk sosialisasi, dengan adanya dugaan penyimpangan dana tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Dikatakannya, tuntutan perangkat badan permusyawaratan desa (BPD) ini disampaikan juga karena administrasi dan penggunaan tidak transparan, serta pihak badan permusyawaratan desa (BPD) tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Padahal sebagaimana dalam aturannya, selaku badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan pengawasan dalam pengelolaannya.

Penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh dan Ni Made (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa baik secara parsial maupun serentak akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Benny Sigiuro (2016) Pengaruh Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran dan Komitmen Perumus Kebijakan Terhadap Responsivitas Anggaran. Menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah/APBD sebesar 19,2% pengaruhnya terhadap responsivitas anggaran. Pengaruh partisipasi yang dapat dikatakan tergolong rendah tersebut tidak terlepas dari mekanisme dan sarana yang

tersedia, partisipasi (pelibatan) masyarakat dapat dilihat dari akses terhadap ruang partisipasi dan hak suara bagi masyarakat.

**Tabel I.1**  
**Laporan Anggaran dan Realiasi Pendapatan Desa (APBDES)**  
**Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru**  
**Tahun Anggaran 2016**

| No. | Nama Desa    | Anggaran    | Realisasi   | Presentase |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1.  | Batu Pance   | 804.824.000 | 361.178.400 | 44%        |
| 2.  | Terusan Lama | 778.641.000 | 359.028.600 | 46%        |
| 3.  | Lampar Baru  | 785.336.000 | 361.398.000 | 46%        |

Sumber: Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru, 2018.

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat gambaran jumlah anggaran di ketiga desa tersebut. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, seharusnya memerlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar, karena adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat di masing-masing desa. Akan tetapi, pada kenyataannya akuntabilitas di Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama dan Desa Lampar Baru belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, sehingga di ketiga desa tersebut untuk anggaran pendapatan hanya terrealiasi masing-masing sebesar 44%, 46% dan 46%. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaannya dan menyebabkan pendapatan desa belum terealisasi dengan baik.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi untuk Belanja Desa**  
**Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru**  
**Tahun Anggaran 2016**

| No | Nama Desa    | Anggaran    | Realisasi   | Presentase |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1. | Batu Pance   | 804.824.000 | 848.742.000 | 105%       |
| 2. | Terusan Lama | 778.641.000 | 821.505.600 | 105%       |
| 3. | Lampar Baru  | 785.336.000 | 833.691.600 | 106%       |

Sumber: Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa pengelolaan anggaran belanja diketiga desa tersebut belum dikelola dengan baik dan menyebabkan ketiga desa tersebut terjadi kelebihan belanja. Hal ini disebabkan ketiga desa tersebut tidak menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik maka ketiga desa tersebut perlu menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban selain itu juga dimasing-masing desa perlu menerapkan azaz-azaz pengelolaan keuangan seperti transparansi, akuntabilitas dan pasrtisipasi.

**Tabel I.3**  
**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**  
**Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru**  
**Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang**  
**Tahun 2016**

| No. | Nama Desa        | Jumlah Kepala<br>Keluarga | Yang Hadir | Presentase<br>(%) |
|-----|------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 1.  | Desa Batu Pance  | 389 KK                    | 23 KK      | 5%                |
| 2.  | Terusan Lama     | 263 KK                    | 18 KK      | 6%                |
| 3.  | Desa Lampar Baru | 245 KK                    | 17 KK      | 6%                |

Sumber: Desa Batu Pance, Desa Terusan Lama, Desa Lampar Baru, 2018

Berdasarkan tabel I.3 tersebut dapat dilihat gambaran jumlah daftar kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2016 bahwa masyarakat desa masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui adanya suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan informasi yang didapat dari berita umum, pengelolaan dana desa yang baik berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat luas dan pembangunan desa setempat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi**

## **Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Survei Pada Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa?
2. Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana.

## 2. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi pemerintah desa agar dalam setiap pengelolaan dana desa harus berdasarkan azas akuntabilitas dan partisipasi, jujur dan akurat hingga pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik dan terhindar dari penyelewengan dana desa demi mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di desa setempat.

## 3. Bagi almanater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Aminuddi (2017). Bola Panas Dana Desa. [https://news.detik.com/kolom/d-3598923/bola-panas-dana-desa?\\_ga=2.137774329.818898682.1540721966-1689568798.1524292094](https://news.detik.com/kolom/d-3598923/bola-panas-dana-desa?_ga=2.137774329.818898682.1540721966-1689568798.1524292094) diakses pada, Selasa 15 Oktober 2017.
- Asrida (2017). Kpk Segera Panggil Mendagri Dan Mendes Pdt Soal Dana Desa.
- David Wijaya (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Diduga Korupsi DD, Dua Kades Empat Lawang Ditahan. <http://www.globalplanet.news/berita/2040/diduga-korupsi-dd-dua-kades-empat-lawang-ditahan>. 23 November 2017 19:29:00 WIB. Nah Ketahuan! Dana Desa Diduga Mulai Diselewengkan. <http://www.rmolsumsel.com/read/2016/09/23/57836/Nah-Ketahuan!-Dana-Desa-Diduga--Mulai-Diselewengkan->. Jum'at, 23 September 2016, 14:48:00 WIB
- Benny Sigiro (2016). Pengaruh Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran dan Komitmen Perumus Kebijakan Terhadap Responsivitas Anggaran. Melalui <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JOM/article/view/408/343>.
- Gerryan Putra. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/131955-ID-pengaruh-akuntabilitas-keuangan-pengawas.pdf>.
- Hanif Nurcholis (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Penerbitalumni.com

[Http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2017/08/04/Kpk-Segera-Panggil-Mendagri-Dan-Mendes-Pdt-Soal-Dana-Desa](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/04/kpk-segera-panggil-mendagri-dan-mendes-pdt-soal-dana-des) diakses pada Jumat, 4 Agustus 2017 15:36 Wib.

Mahmudi (2010). *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemenykn.

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Andi.

Mursyidi (2009). *Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama

Ni Luh Putu Uttari Premananda. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. Melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27160/18053>.

R. Ait Novatiani Dan Nurmalita Lestari (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah ( Apbd ) Di DPRD Kota Bandung. Melalui <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4243/CONTENT%20R.%20AIT%20N.pdf;sequence=1>.

Riduwan (2013). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta

Solekhan (2015). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Setara Press

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Yuliansyah (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Selemba Empat.